



Anju Rayman  
 Lumban Gaol<sup>1</sup>  
 Ardin Dolok Saribu<sup>2</sup>  
 Mangasa Sinurat<sup>3</sup>

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR CAMAT MEDAN PERJUANGAN

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara individu. Kajian terhadap akuntabilitas dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 89 pegawai yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini terdiri dari 39 pegawai aktif yang bekerja di Lingkungan Kecamatan Medan Perjuangan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gaya Kepemimpinan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil dari nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,671, menunjukkan bahwa pengendalian intern, gaya kepemimpinan, ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 67,1%, sisanya 32,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan, Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### Abstract

This study aims to identify factors that affect the performance accountability of government agencies partially. Research on accountability is conducted by utilizing a quantitative approach. The total population applied in this study was 89 employees in Medan Perjuangan Subdistrict. The number of samples in this study consisted of 39 active employees working in the Medan Perjuangan Subdistrict Environment. The technique used in collecting data in this study was carried out by questionnaire method and analyzed using multiple linear regression. The findings of this study indicate that Internal Control has a positive and significant effect on Government Agency Performance Accountability, Leadership Style has a negative but insignificant effect on Government Agency Performance Accountability, and Obedience to Laws and Regulations has a positive but insignificant effect on Government Agency Performance Accountability. The results of the coefficient of determination  $R^2$  value of 0.671, indicate that internal control, leadership style, obedience to laws and regulations on Government Agency Performance Accountability is 67.1%, the remaining 32.9% is influenced by other factors not used in this study.

**Keywords:** Internal Control, Leadership Style, Obedience to Legislation, Government Agency Performance Accountability.

### PENDAHULUAN

Organisasi pemerintah daerah adalah entitas yang bertanggung jawab menjalankan fungsi pemerintahan dengan melekatnya legitimasi yang diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu, permintaan untuk keterbukaan informasi publik dan pertanggungjawaban kinerja badan publik, terutama terkait dengan segala kegiatan yang melibatkan dana dari masyarakat, sangatlah umum. Sebagai bagian dari sektor publik, hal ini harus memenuhi persyaratan akuntabilitas

<sup>1,2,3</sup>, Akuntansi, Universitas HKBP Nommensen Medan

email: anju.lumbangaol@student.uhn.ac.id, ardindoloksaribu@uhn.ac.id, mangasa.sinurat62@gmail.com

kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998.

Menurut Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PANRB telah mengembangkan SAKIP sebagai bentuk bahwa instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh para pihak yang terlibat. SAKIP bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan target kinerja yang terukur melalui laporan kinerja instansi secara berkala. Evaluasi nasional terhadap SAKIP menunjukkan bahwa instansi pemerintah di Indonesia semakin efektif dalam memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana pembangunan. Hal ini terlihat dari kemampuan instansi untuk melakukan penyesuaian program yang berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan. (Febrianti and Indrawati Yuhertiana 2021)

Pemerintahan yang bertugas dalam menyediakan layanan publik harus menjalankan prinsip terbuka dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah merujuk pada tanggung jawab sebuah lembaga pemerintah untuk melaporkan pelaksanaan tujuan organisasi dalam rangka meraih tujuan serta target yang sudah disepakati, dengan menggunakan mekanisme pelaporan tanggung jawab secara berkala.

Mardiasmo, (2009) dalam (Natya Sekar Arum 2016) menyatakan ada tiga fungsi utama dalam organisasi sektor publik:

1. Melakukan pelayanan kepada publik
2. Menjelaskan prinsip dasar yang mengatur cara kerja rakyat
3. Memfasilitasi layanan masyarakat yang dibutuhkan karena sektor non pemerintah tidak bersedia mengelolanya..

Pengelolaan pemerintahan yang efektif (*good governance*) adalah tujuan bersama. Akuntabilitas dianggap dapat merubah situasi pemerintah yang buruk dan korup menjadi sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan efektif dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintahan yang bertanggung jawab akan mendapatkan dukungan dari publik, percaya pada apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh program yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Bagi pelaksana, akuntabilitas menggambarkan dedikasi pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. (Riantiaro, 2011).

Penting untuk mengevaluasi capaian pemerintah guna memahami sejauh mana pemerintah memenuhi tanggungjawabnya. Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Kinerja keuangan dapat dinilai melalui analisis laporan keuangan yang disusun secara periodik. Sementara itu, penilaian kinerja non-keuangan melibatkan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah. Tujuan dari pengukuran kinerja instansi pemerintah adalah untuk memperbaiki tanggung jawab, kejelasan, manajemen organisasi, serta meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah syarat untuk mewujudkan harapan masyarakat serta meraih tujuan dan aspirasi bangsa dan negara (Yuda, 2011). Dengan menerapkan pemerintahan yang baik secara efektif, performa organisasi akan berlangsung lancar dan selaras sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya menciptakan *good governance*, pemerintah berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan kualitas negara. Tuntutan terhadap penerapan *good governance* mulai meningkat di Indonesia, terutama sejak munculnya tuntutan reformasi di berbagai bidang pada tahun 1997.

Menurut Herwidayatmo (2000) *good governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola suatu pemerintahan kearah peningkatan kinerja pemerintah dan akuntabilitas publik. Tata pemerintahan mencakup penggunaan wewenang dalam bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola urusan negara di berbagai tingkat. Ciri-ciri tata pemerintahan yang baik (*good governance*) meliputi partisipasi semua pihak; transparansi dan pertanggungjawaban; efektivitas dan keadilan; penegakan supremasi hukum; memastikan bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; serta memperhatikan kepentingan kelompok paling miskin dan rentan dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya pembangunan.

Menurut Wardani (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah mencakup penerapan *good corporate governance*, di mana salah satu prinsip utamanya adalah

akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas ini berpengaruh pada kinerja organisasi, baik di sektor pemerintah maupun non pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi pertanggungjawaban di sektor pemerintah sangat penting untuk menaikkan kinerja dan transparansi lembaga pemerintahan. Selain hal tersebut, dibutuhkan juga dasar hukum sehingga aparat pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan konsisten dan patuh, demi terwujudnya akuntabilitas kinerja.

Adapun aspek yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pertama yaitu pengendalian intern. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319 sistem pengendalian intern yang memiliki tujuan organisasi melalui efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku. Pernyataan diatas dapat didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajar Bayu Putri Perwirasari 2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian diatas bertolak belakang dengan hasil penelitian (Anto, Alamsyah, and Indrawan 2022) hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah gaya kepemimpinan. Menurut Mulyadi, (2015) Gaya kepemimpinan adalah cara unik yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi pegawainya dalam mencapai tujuan organisasi. Pernyataan diatas searah dengan hasil penelitian (Istiqomatunnisa, 2017) hasil penelitian menunjukkan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Faktor terakhir yang berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan menurut (Setyawan 2017), Ketaatan terhadap peraturan perundangan mengacu pada ketaatan individu untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga negara atau aparat berwenang yang memiliki kuasa hukum untuk mengatur dan mengendalikan hidup berbangsa dan bernegara. Pernyataan diatas sejalan dengan hasil penelitian (Dewata et al. 2020) hasil penelitian menunjukkan peraturan perundangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan konsep dan kenyataan yang diuraikan serta hasil kajian empiris yang ada, tampak bahwa terdapat ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam hasil penelitian, yang dikenal sebagai *research gap* (kesenjangan penelitian). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengendalian internal, gaya kepemimpinan, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam hubungannya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja merupakan parameter yang mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan, hasil dari kegiatan dan program. Ukuran kinerja untuk instansi pemerintah wajib konsisten di setiap tingkat unit organisasi.

Indikator pengendalian intern mencakup pencapaian tujuan melalui pelaksanaan aktivitas yang efisien dan efektif serta keandalan dalam laporan finansial. Diharapkan bahwa dengan mencapai kedua indikator tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, mengoptimalkan alokasi sumber daya publik, memastikan pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam pengelolaan finansial negara, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.

Indikator gaya kepemimpinan dalam pemerintahan mencakup implementasi tingkah laku kerja yang mencerminkan gaya kepemimpinan yang jelas, serta kemampuan pemimpin untuk mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan keseluruhan organisasi. Diharapkan dengan penerapan kedua indikator ini, pemerintah dapat memperkuat budaya kerja yang terstruktur, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, sambil juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan pegawai serta mencapai efektivitas organisasi yang lebih besar dalam mencapai misi dan tujuan publik.

Indikator ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan mencakup mematuhi peraturan lembaga negara dan kekuatan hukum peraturan. Diharapkan ketaatan ini memelihara supremasi hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang teratur dan aman, sambil menegakkan keadilan dalam penegakan hukum untuk memperkuat tatanan hukum dan stabilitas sosial.

Menurut Dian Kemala, (2013) dalam (Bagus Fatkhul Alam, Bagoes Soenarjanto 2022) telah dilakukan penelitian mengenai dampak pemahaman prinsip-prinsip tata kelola yang baik,

pengendalian intern, serta komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga dapat mencapai kinerja sektor publik yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan pengendalian internal. Untuk merencanakan strategi, pemerintah harus mempertimbangkan aturan hukum dan regulasi yang berlaku. Terdapat sejumlah penyimpangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kurang tepat dengan ketentuan yang ditetapkan. (Bagus Fatkhul Alam, Bagoes Soenarjanto 2022)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana sebuah instansi pemerintah memenuhi tanggung jawabnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi serta mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan melakukan pertanggungjawaban secara berkala. LAKIP berlaku juga untuk dinas-dinas di daerah dalam memajukan tugas pokok dan fungsinya. Setiap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disiapkan harus diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk kemudian dinilai.

Selain mempertimbangkan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, penting juga untuk memiliki dasar hukum yang kuat sehingga setiap pegawai pemerintah tetap konsisten dan patuh dalam melaksanakan kewajibannya, dengan tujuan mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Seleman (2007) menjelaskan bahwa ada tiga undang-undang utama di bidang keuangan negara yang menjadi dasar hukum reformasi keuangan negara untuk mencapai *good governance*, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Dalam konteks administrasi pemerintahan, penerbitan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah salah satu langkah pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan yang efektif serta dapat dipercaya. Meskipun beragam peraturan telah diterbitkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, masih banyak daerah yang kurang mematuhi dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tentu saja, keadaan tersebut sangat mengkhawatirkan jika Perangkat Daerah (PD) tidak menyusun dan mengajukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka bagaimana masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah. Penting bagi masyarakat untuk memahami tujuan ke depan yang akan dilaksanakan pemerintah. Oleh karena itu, seluruh Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun dan mengajukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian (Fajar Bayu Putri Perwirasari 2016) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana variabel independennya yaitu *good governance*, pengendalian intern, gaya kepemimpinan, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu tempat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Camat Medan Perjuangan.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas, sehingga hal yang patut diperhatikan adalah bahwa di Kantor Camat Medan Perjuangan terdapat beberapa Perangkat Daerah (PD) yang belum melaksanakan tugasnya dalam penyusunan dan mengajukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Keterlambatan ini mencerminkan kurangnya keseriusan dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam regulasi pemerintah terkait akuntabilitas kinerja. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan masalah administratif semata, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas. Misalnya, ketidaktersediaan informasi yang akurat dan terperinci tentang kinerja instansi pemerintah menghambat kemampuan pemangku kepentingan, seperti masyarakat umum dan lembaga pengawas, untuk melakukan evaluasi yang efektif terhadap kinerja pemerintah. Hal ini juga menciptakan keraguan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan demikian, penundaan atau kegagalan dalam menyusun LAKIP bukan hanya masalah administratif internal, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan legitimasi pemerintah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas sehingga peneliti tertarik untuk

mengambil judul mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Camat Medan Perjuangan”.

## **METODE**

Penelitian terhadap akuntabilitas ini dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang aktif dalam menjalankan tugasnya di lingkungan Kecamatan Medan Perjuangan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 89 Pegawai Negeri Sipil yang aktif dalam menjalankan tugasnya. Mereka merupakan subjek utama yang akan menjadi landasan dalam menggali informasi dan menganalisis data dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode *purposive sampling* dimana metode tersebut bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 39 pegawai yang aktif di Lingkungan Kecamatan Medan Perjuangan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Statistik Deskriptif**

1. Pengendalian Intern (X1), dengan jumlah responden (N) sebanyak 39 responden dengan skor minimum adalah 9 dan skor maksimum adalah 15.
2. Gaya Kepemimpinan (X2), dengan jumlah responden (N) sebanyak 39 responden dengan skor minimum adalah 2 dan skor maksimum adalah 10.
3. Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan (X3), dengan jumlah responden (N) 39 responden dengan skor minimum adalah 6 dan skor maksimum adalah 10.
4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Y), dengan jumlah responden 39 responden dengan skor minimum adalah 9 dan skor maksimum adalah 15.

#### **Hasil Uji Validitas**

##### **a. Variabel Pengendalian intern**

Nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pengendalian intern (X1) dinyatakan valid dengan kata lain seluruh butir pernyataan sudah relevan dengan tujuan pengukuran.

##### **b. Variabel Gaya Kepemimpinan**

Nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan gaya kepemimpinan (X2) dinyatakan valid dengan kata lain seluruh butir pernyataan sudah relevan dengan tujuan pengukuran.

##### **c. Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan**

Nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X3) dinyatakan valid dengan kata lain seluruh butir pernyataan sudah relevan dengan tujuan pengukuran.

##### **d. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dinyatakan valid dengan kata lain seluruh butir pernyataan sudah relevan dengan tujuan pengukuran.

#### **Uji Reliabilitas**

##### **a. Variabel Pengendalian Intern**

Nilai *Cronbach's Alpha* > nilai batas yaitu 0,900 > 0,60 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern (X1) telah reliabel.

##### **b. Variabel Gaya Kepemimpinan**

Nilai *Cronbach's Alpha* > nilai batas yaitu 0,796 > 0,60 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan (X2) telah reliabel.

##### **c. Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan**

Nilai *Cronbach's Alpha* > nilai batas yaitu 0,896 > 0,60 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X3) telah reliabel.

##### **d. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Nilai *Cronbach's Alpha* > nilai batas yaitu 0,870 > 0,60 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) telah reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**

Nilai signifikansi  $0,112 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

**2. Uji Multikolinearitas**

Nilai *tolerance* lebih dari  $0,10$ , dimana Pengendalian Intern  $0,526 > 0,10$ , Gaya Kepemimpinan  $0,905 > 0,10$ , dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan  $0,491 > 0,10$ . Pada perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari  $10$ , dimana Pengendalian intern memiliki nilai VIF  $1,901 < 10$ , Gaya Kepemimpinan  $1,105 < 10$ , Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan  $2,038 < 10$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi ini.

**3. Uji Heteroskedastisitas**

Titik-titik tersebar secara acak dan merata, baik di atas maupun di bawah. atau disekitar angka  $0$  dan tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

**Pengujian Hipotesis**

**1. Uji Parsial (Uji t)**

Tabel 1. Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,644	1,312		2,016	,052
	PI	,618	,118	,672	5,236	,000
	GK	-,048	,089	-,053	-,542	,591
	KPP	,321	,190	,224	1,689	,100

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2023

Dari Tabel 1 telah terdapat hasil uji t sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengendalian Intern (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar  $5,236 >$  dari t tabel  $2,030$  dan koefisien  $B = 0,618$  dengan nilai sig  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat diartikan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berarti setiap penambahan Pengendalian Intern satu satuan akan menaikkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Medan Perjuangan sebesar  $0,618$ . Kemudian kenaikan tersebut bersifat signifikan.

Pada variabel Gaya Kepemimpinan (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar  $-0,542 <$  dari t tabel  $-2,030$  dan koefisien  $B = -0,048$  dengan nilai sig  $0,591 > 0,05$  sehingga dapat diartikan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berarti setiap penambahan Gaya Kepemimpinan satu satuan akan menurunkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Medan Perjuangan sebesar  $-0,048$ . Tetapi penurunan tersebut tidak bersifat signifikan.

Pada variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar  $1,689 <$  dari t tabel  $2,030$  dan koefisien  $B = 0,321$  dengan nilai sig  $0,100 > 0,05$  sehingga dapat diartikan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berarti setiap penambahan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan satu satuan akan menaikkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Medan Perjuangan sebesar  $0,321$ . Tetapi kenaikan tersebut tidak bersifat signifikan.

**2. Analisis Regresi Linear Berganda**

Tabel 2. Analisis Regresi Berganda

Coefficients <sup>a</sup>	
---------------------------	--

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,644	1,312		2,016	,052
	PI	,618	,118	,672	5,236	,000
	GK	-,048	,089	-,053	-,542	,591
	KPP	,321	,190	,224	1,689	,100

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2023

Berdasarkan data pada tabel 2 pada bagian *Unstandardized Coefficients* di kolom B diperoleh nilai pada variabel pengendalian intern sebesar 0,618, variabel gaya kepemimpinan - 0,048, ketaatan pada peraturan perundang-undangan 0,321 dan memiliki nilai konstanta ( $\alpha$ ) 2,644 maka dapat dibuat persamaan linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,644 + 0,618 X_1 - 0,048 X_2 + 0,321 X_3$$

Dari hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 2,644 yang menunjukkan bahwa jika nilai variabel bebas (pengendalian intern, gaya kepemimpinan, ketaatan pada peraturan perundang-undangan) sama dengan 0 maka besar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Camat Medan Perjuangan adalah 2,644. Koefisien X1 sebesar 0,618 menyatakan bahwa pengendalian intern (X1) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain peningkatan satu satuan pada variabel pengendalian intern (X1) akan menyebabkan peningkatan AKIP sebesar 0,618. Kemudian koefisien X2 sebesar -0,048 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan (X2) berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain peningkatan satu satuan pada variabel gaya kepemimpinan (X2) akan menyebabkan penurunan AKIP sebesar -0,048. Sedangkan koefisien X3 sebesar 0,321 menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan (X3) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, atau dengan kata lain peningkatan satu satuan pada variabel ketaatan pada peraturan (X3) akan menyebabkan peningkatan AKIP sebesar 0,321.

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,835 <sup>a</sup>	,697	,671	,98771

a. Predictors: (Constant), KPP, GK, PI

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2023

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel 3 didapatkan nilai *adjusted R square* yaitu sebesar 0,671 artinya 67,1% dari tiga variabel independen yaitu pengendalian intern, gaya kepemimpinan, ketaatan pada peraturan perundang-undangan mempengaruhi variabel dependen (Y) yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan sisanya sebesar 32,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hal ini menandakan bahwa pengendalian intern mendukung akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319 sistem pengendalian intern memiliki tujuan organisasi melalui Keefektifan dan keefisienan operasional, serta ketepatan pelaporan. keuangan dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh penulis sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Reni Febrianti, Anis Feblin (2019) dan Aprilianti, Wulan, and Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anto, Alamsyah, and Indrawan (2022) dan Reza Viola, Andriana, and Wardhaningrum (2023) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **Gaya Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,591 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Gaya kepemimpinan merujuk pada pola perilaku yang sengaja digunakan untuk memengaruhi anggota bawahannya agar dapat mencapai kinerja optimal, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.

#### **Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,100 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hal ini menandakan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan mendukung akuntabilitas kinerja pemerintahan. Setyawan (2017) ketaatan pada peraturan perundang-undangan merupakan kesediaan seseorang untuk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara atau aparat yang berwenang, yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur dan menjaga keteraturan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data, dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Gaya Kepemimpinan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
3. Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Pengendalian intern, gaya kepemimpinan, ketaatan pada peraturan perundang-undangan menjelaskan pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hanya sebesar 67,1%, sedangkan sisanya 32,9% dipengaruhi faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas. 2023. "Populasi Dalam Penelitian Merupakan Suatu Hal Yang Sangat Penting, Karena Ia Merupakan Sumber Informasi."
- Andarias, Andarias, and Anugrah Lutfi. 2021. "Pengaruh Kepemimpinan Dan Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Sulselbar Kantor Pusat Makassar."
- Anto, Hendri, Sakti Alamsyah, and Andri Indrawan. 2022. "Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Instansi Pemerintah."
- Aprilianti, Dewi, Mulyaning Wulan, and Herwin Kurniawan. 2020. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan."
- Ardin Dolok Saribu. 2023. Book Kumpulan Istilah AKUNTANSI KEUANGAN & BIAYA.
- Ardinty, Frisca Yustin, Wikan Budi Utami, and Sri Laksmi Pardanawati. 2022. "Analisa Pengaruh Pemahaman Prinsip Good Corporate Governance, Pengendalian Intern, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kateguhan, Sawit, Boyolali."
- Bagus Fatkhul Alam, Bagoes Soenarjanto, Anggraeny Puspaningtyas. 2022. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Sebagai Landasan Suatu Organisasi Dalam Meningkatkan Mutu Kepegawaian."
- Bakti, Bahriyah Eka Musha, and Triyono. 2022. "Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia."

- Dewata, E., Y. Sari, H. Jauhari, and T. D. Lestari. 2020. "Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah."
- Dr. Anik Yuesti, Se., mm, Ni Luh Putu Sandrya Dewi I Gusti Ayu Asri Pramesti, Se., Ms. 2020. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik.
- Dr. H. M. Idris Patarai, M.Si. 2015. Ombudsman Dan Akuntabilitas Publik.
- Edowai, Mikael, Herminawaty Abubakar, and Miah Said. 2021. Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Fajar Bayu Putri Perwirasari. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Akip)."
- Fajriah, Lailatul, and M. Taufiq Hidayat. 2019. "Penerapan Balanced Scorecard Dalam Pengukuran Kinerja Organisasi Publik (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto)."
- Febrianti, Tania, and Indrawati Yuhertiana. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah."
- Firsti Zakia Indri, and Gerry Hamdani Putra. 2022. "Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020."
- Fратиwi, U'ah Ganda. 2018. "PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR) U'ah Ganda Fratiwi 1."
- Harun, M. Iqra. 2022. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah."
- Hidayat, M. Taufiq. 2023. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Literatur Review."
- Istiqomatunnisa, I., A. Tanjung, and R. Rusli. 2017. "Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Skpd Kabupaten Siak)."
- Janna, Nilda Miftahul, and Herianto. 2021. "Artikel Statistik Yang Benar."
- Kepala Badan Kepegawaian Negara. 2014. "Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara."
- Lesmana, Hendra. 2021. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kelurahan Pasarbatang."
- Lestari Waruwu. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah."
- Lia Hari Kurniawati. 2024. "Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan."
- Natya Sekar Arum. 2016. "PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD (STUDI PADA SKPD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)."
- Nurjaya, N. (2021). 2021. "Pengaruh Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Hazara Cipta Pesona."
- Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan
- Permatasari, Sulisty Wardani dan Rita Intan. 2022. "Pengaruh Pengembangan Karier Dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Staf Umum Bagian Pergudangan Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) Di Tangerang."
- PP 60 Tahun 2008. 2008. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia."
- Prawiyogi, Anggy Giri, Tia Latifatu Sadiyah, Andri Purwanugraha, and Popy Nur Elisa. 2021. "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar."
- Reni Febrianti, Anis Feblin, Hasiatul Aini. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu."
- Reza Viola, Ima, Andriana Andriana, and Oktaviani Ari Wardhaningrum. 2023. "PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN INTERNAL DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA

- PEMERINTAH (Studi Empiris Pada SKPD Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur).”
- Sanaky, Musrifah Mardiani. 2021. “Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah.”
- Setyawan, Hari. 2017. “Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru Indonesia.”
- Sinta Herlini Putri. 2020. “Pengaruh Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.”
- Solikin, Asep, Muhammad Fatchurahman, and Supardi Supardi. 2017. “Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri.”